



OPDINI PENDIDIKAN 2007

KURIKULUM & PERBUKUAN

Direktorat
Pendidikan

8

Departemen Pendidikan Nasional

370-9598

OPI

9



OPINI
PENDIDIKAN
2007

Kurikulum & Perbukuan

Editor:

Bambang Wasito Adi

Yusmawardi

M.Q. Wisnu Aji

Setiono

Haryani

Dian Srinursih

Subiyanto

A. Chaedar Alwasilah

A. Buchori

Illa Kartila

Departemen Pendidikan Nasional

2007

Opini Pendidikan 2007

Kurikulum dan Perbukuan

Diterbitkan oleh :
Pusat Informasi dan Humas
Departemen Pendidikan Nasional

Edisi pertama, Desember 2007

ISBN : 978-979-15617-3-0 (jilid lengkap)
ISBN : 979-978-15617-6-1 (jilid 3)

Sekretariat :
Yuswan Rosepi
Zainuddin
Tini Setiawati
Bayu Pratama

Desain Grafis :
Vina Adriani

Kata Pengantar *Editor*

*"The editor doesn't make the news...
but he does interpret it and shape it,
as the conductor does... Above all,
he selects what's going to be
on the program, which is one hell of a power".*
– Hedley Donovan

Kumpulan tajuk ini merupakan memori kolektif dari bagian perjalanan pembangunan ihwal pendidikan nasional, khususnya dalam rentang 2006-2007. Editorial adalah opini cerdas, kritis, visioner, dan reflektif dari sebuah media massa. Setiap hari lazimnya tiap media menurunkan tajuk yang berbeda, namun sering ditemukan isu yang sama walau dimuat pada hari yang berbeda diwacanakan sama kritisnya oleh beberapa media. Dengan kata lain, walaupun tajuk itu menyajikan sudut pandang subjektif, secara keseluruhan media massa menghadirkan sejumlah intersubjektivitas. Intersubjektivitas demikian itu boleh saja dianggap sebagai kesimpulan handal saat itu. Media massa adalah potret kehidupan sebuah bangsa, dan tajuk ihwal pendidikan adalah menggambarkan potret pendidikan bangsa itu!

Pendidikan adalah persoalan besar bagi bangsa dimana pun di muka bumi ini. Karena itu persoalan pendidikan seyogianya menjadi kepedulian semua pihak. Buku ini menghimpun sejumlah tajuk yang kami seleksi dari berbagai media cetak yang sampai ke Pusat Informasi dan Humas Depdiknas. Tajuk-tajuk itu pada umumnya masih mencuatkan isu-isu klasik, yaitu seputar pendidikan secara umum (7 naskah), guru (7 naskah), kurikulum (4 naskah), perbukuan (5 naskah), anggaran pendidikan (9 naskah), ujian nasional (11 naskah), prestasi (4 naskah), pendidikan tinggi (6 naskah), dan kekerasan dalam pendidikan (6 naskah).

Di luar dugaan kami pada tahun 2006-2007 isu kekerasan sangat menonjol dalam pemberitaan di media massa sehingga menjadi tajuk berita pada sejumlah media cetak terkemuka nasional. Itulah sebabnya

kami merasa perlu mengelompokkannya dalam kategori khusus. Kami mengajak semua pihak untuk introspeksi, “Mengapa dalam dunia pendidikan masih ada kekerasan?” Isu kedua dan ketiga yang paling banyak diwacanakan adalah masih sekitar ujian nasional dan anggaran pendidikan. Artinya dua isu ini masih tetap mengganjal dan merupakan pekerjaan rumah kita bersama yang perlu segera diselesaikan bersama.

Kami berharap bahwa buku ini akan menjadi rujukan semua pihak, khususnya para pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan. Buku ini tak pelak lagi sebagai dokumen perjalanan sejarah pembangunan pendidikan di tanah air pada tahun 2007 yang perlu dicermati untuk merancang kebijakan pendidikan di masa-masa mendatang.

Jakarta, Desember 2007

Editor

Pengantar

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Buku serial '*Opini Pendidikan 2007*' merupakan kali pertama diterbitkan oleh Pusat Informasi dan Humas Depdiknas, dengan tujuan untuk mendokumentasikan berbagai opini yang menyoroti masalah pendidikan yang pernah dimuat oleh berbagai media massa selama kurun 2006-2007.

Opini tentang isu pendidikan yang ditulis dalam editorial sebuah media massa, boleh jadi bukan sekedar pemikiran atau pendapat editor dari media massa yang bersangkutan, tetapi juga merupakan rangkuman pendapat yang mencerminkan wacana publik yang sedang berkembang tentang sebuah isu pendidikan.

Bagi Depdiknas, berbagai pendapat serta pemikiran tentang berbagai isu pendidikan yang disalurkan melalui tulisan di media massa dalam sebuah Tajuk atau Editorial, adalah sebuah bentuk perhatian dan kepedulian media massa terhadap pendidikan yang sungguh patut untuk disimak dan dicermati karena tentu akan memberikan wacana yang semakin luas terhadap masalah pendidikan, yang pada gilirannya tentu akan lebih mendorong terciptanya keterbukaan dalam penyusunan berbagai kebijakan tentang pendidikan nasional.

Karena alasan tersebut, Pusat Informasi dan Humas Depdiknas berinisiatif untuk mendokumentasikan Tujuk atau Editorial tentang berbagai isu pendidikan yang pernah dimuat oleh media massa pada tahun 2006-2007. Selama tahun 2006-2007, tidak kurang dari 191 naskah Tajuk atau Editorial tentang pendidikan pernah dimuat oleh media massa pusat maupun daerah, dengan nada dan arah tulisan yang berbagai macam pula, yaitu mulai dari yang bernada konstruktif mendukung sebuah kebijakan pendidikan, memberi saran, memperingatkan, mengkritisi atau bahkan mengkritik, dan sebagainya.

Agar lebih mudah di ikuti dan enak dibaca, '**Opini Pendidikan 2007**' disusun dalam serial dengan mengelompokkan per isu pendidikan, seperti misalnya isu Ujian Nasional, isu Guru, isu anggaran pendidikan, isu kurikulum dan perbukuan, dan lain-lain.

Kami berharap buku '**Opini Pendidikan 2007**' ini dapat dijadikan bahan rujukan dan referensi bagi para pemangku kepentingan pendidikan mulai dari para pendidik, pakar pendidikan, pemerhati pendidikan, dan kalangan birokrasi pendidikan, yang pada akhirnya tentu dapat memperluas khasanah dan wawasan masyarakat luas dalam upaya kita untuk memberikan sumbangan yang terbaik bagi pembangunan pendidikan nasional.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Jakarta, Desember 2007

Kepala Pusat Informasi dan Humas
Departemen Pendidikan Nasional

Bambang Wasito Adi

Daftar Isi

Kata Pengantar Editor.....	iii
Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vii

KURIKULUM

1. Memasuki Sistem Pembelajaran <i>Online</i>	1
2. Kisruh Pendidikan.....	3
3. Pelarangan Buku Teks Sejarah untuk SMP-SMA.....	5
4. Pelarangan Buku Pelajaran.....	7

PERBUKUAN

5. Pembentukan Bangsa dan Balai Pustaka.....	11
6. Kesadaran Masyarakat Kita Membaca Buku.....	13
7. Harga Buku yang Lebih Terjangkau.....	15
8. PBA Harus Dorong Budaya Baca.....	17
9. Minat Baca yang Mengkhawatirkan.....	19



Kurikulum & Perbukuan

Memasuki Sistem Pembelajaran *Online*

Kedaulatan Rakyat, 15 Maret 2007

Sri Sultan Hamengku Buwono X selaku Gubernur DIY, baru-baru ini meluncurkan Jogja Learning Gateway di kantor Dinas Pendidikan Propinsi DIY. Yakni, sistem pembelajaran *online* yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Betapa pun sistem ini termasuk ketinggalan, ketika negara-negara lain sudah mengawali jauh sebelum ini, toh apa yang dilakukan di DIY ini bisa dinilai selangkah lebih maju. Terutama jika dibandingkan dengan daerah-daerah yang sama sekali belum menyentuh teknologi informasi.

Kita merasa bangga, begitu pulalah kiranya masyarakat DIY yang diwakili oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X, karena DIY tidak ketinggalan amat. Sistem yang kita hadapi ini lebih bersifat terbuka. Artinya, siapa saja bisa mengakses, asal mempunyai *password*. Tersedia bagi masyarakat luas yang berminat dan sivitas persekolahan yang berkepentingan. Bersifat pengayaan materi pembelajaran siswa, sehingga dalam proses belajar mengajar tak cuma mengandalkan kemampuan sang guru kelas.

Tentu saja, pengenalan sistem pembelajaran *online* ini tidak akan menihilkan arti guru. Tetap saja, guru memiliki peran di kelas. Memang, selama ini temu muka yang terjadi antara siswa dan guru di kelas bisa menimbulkan kebosanan. Apabila sang guru tidak mampu membawa diri di depan kelas, maka siswa akan memperoleh kebosanan. Juga apabila guru tidak bertambah ilmunya sedang siswa terus memperoleh perkembangan, maka akan terjadi ketimpangan. Toh, di sisi lain disadari bahwa guru tak harus pasif dan *introvert*. Guru harus terus belajar dan menambah ilmu, hanya saja sarananya yang kadang tak menjangkau.

Dengan adanya sistem baru yang dikenalkan ini, peran guru sebagai mediator dari keingintahuan siswa, sedang siswa tidak lagi sebagai objek melainkan subjek. Sebagai sebuah gateway, dari situlah pintu masuk segala ilmu pengetahuan. Tak hanya berlaku bagi siswa dan guru, tapi juga bagi orangtua dan masyarakat pada umumnya.

Sistem semacam ini, pernah dipertontonkan oleh Cina ketika Dewan

Pendidikan DIY melakukan kajian strategis mengenai informasi teknologi tahun 2005. Ketika para siswa tak bisa masuk sekolah karena wabah SARS sedang berkecamuk, mereka belajar dari rumah masing-masing menggunakan sistem *online*.

Sistem ini sungguh sangat inspiratif, sehingga belajar itu tak dibatasi dari pukul 07.00 sampai 14.00. Setiap saat, siswa bisa mengembangkannya. Sebelum peluncuran Jogja Learning Gateway, sudah banyak siswa yang menggunakan peralatan teknologi informasi untuk memenuhi tugas-tugasnya.

Keakraban mereka pada komputer pun kadang sudah melampaui gurunya. Semula, terbatasnya pemahaman ini bisa diduga menjadi kendala. Akan tetapi, kendala semacam itu bisa diatasi dengan kemauan keras untuk maju. Oleh karena itu, ke depan justru tantangan pemanfaatan teknologi canggih ini kian besar. Mari kita jawab tantangan itu bersama-sama.***

Kisruh Pendidikan

Pikiran Rakyat, 13 Juli 2006

Kisruh dunia ini jangan sampai jatuh untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, melainkan harus memacu para "stakeholders" menyempurnakan sistem.

Sejak hasil ujian nasional (UN) diumumkan, orang tua murid dan siswa dalam dua bulan terakhir mengalami "sport jantung" berulang-ulang. Meskipun hasil ujian nasional tahun ini relatif lebih baik, namun tetap menyisakan persoalan pelik, terutama bagi siswa yang tidak lulus dalam tiga mata pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Ujian paket diharapkan mampu menjadi obat penawar, meskipun terus menerus menimbulkan kontroversi.

Meski heboh soal UN semakin mereda, kini giliran penerimaan siswa baru (PSB) yang kisruh. Bagi siswa dan orang tua dari sekolah-sekolah yang bukan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), PSB tidak menjadi masalah pelik. Tapi bagi siswa-siswa dari sekolah KBK, PSB tahun ini menjadi ujian baru bagi dunia pendidikan kita.

Persoalannya, sekolah KBK yang terdiri dari sekolah-sekolah favorit sedang diujicobakan sebuah kurikulum yang memungkinkan para siswanya untuk semakin dinamis. Mereka mendapatkan beban kualitas yang lebih dibandingkan dengan sekolah non-KBK.

Akibatnya, skor rata-rata siswa sekolah KBK menjadi relatif lebih kecil dibandingkan sekolah non-KBK. Padahal, secara hakiki, skor yang lebih kecil memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan skor non-KBK yang lebih tinggi.

Ironisnya, saat siswa akan melanjutkan sekolah ke jenjang lebih lanjut, skor lulusan KBK dan non-KBK disamaratakan. Akibatnya, para lulusan KBK kalah bersaing dengan sekolah-sekolah non-KBK. Padahal masa-masa sebelumnya, sekolah favorit menjadi lambang "jaminan mutu" bagi sekolah untuk melanjutkan studi ke jenjang berikutnya.

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung yang menambah kuota

sebanyak dua orang untuk masing-masing kelas bagi siswa KBK, menjadi jalan keluar. Meski demikian, hal itu bersifat sementara, dan perlu dipikirkan solusi yang baku dan lebih adil.

Berakhirnya kasus KBK bukanlah akhir dari kisruh dunia pendidikan. Orang tua siswa masih akan menghadapi persoalan yang membuat jantung berdetak lebih kencang, yaitu pembayaran dan fasilitas sekolah. Meskipun pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah (BOS), bukan berarti orang tua sama sekali tidak harus membayar.

Pihak sekolah sangat kreatif membuat berbagai macam judul pungutan agar dapat meraih uang dari siswa, sebab biaya operasional sekolah memang tidak cukup berasal dari BOS. Belum lagi dana siluman untuk siswa-siswa yang sesungguhnya secara akademik tidak dapat masuk sekolah yang diinginkan. Kasak-kusuk di balik layar tentu saja bermuara kepada persoalan keuangan.

Kisruh di dunia pendidikan ini tidak perlu disesali, karena merupakan bagian dari dinamika bangsa menuju cita-cita masa depan yang lebih baik. Dinamika tersebut menunjukkan semakin tingginya kesadaran tentang perlunya pendidikan yang, lebih baik.

Meski demikian, kisruh dunia ini jangan sampai jatuh untuk dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, melainkan harus memacu para *stakeholders* menyempurnakan sistem dan terus memeratakan pendidikan.***

Pelarangan Buku Teks Sejarah Untuk SMP-SMA

Kedaulatan Rakyat, 12 Maret 2007

Kejaksanaan Agung secara resmi melarang pengadaan dan peredaran buku teks sejarah untuk SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang mengacu pada Kurikulum 2004. Larangan yang dituangkan dalam Keputusan Jaksa Agung tanggal 5 Maret 2007 itu dilakukan setelah Direktorat Sosial Politik pada Bagian Intelijen Kejaksaan Agung meneliti buku sejarah terkait penulisan peristiwa politik di Indonesia tahun 1965. Penelitian dilakukan berdasar surat permintaan Mendiknas tertanggal 5 Juli 2005.

Jaksa Agung Muda Mochtar Arifin menyatakan, buku teks sejarah yang mengacu pada Kurikulum 2004 itu tidak sepenuhnya mencantumkan fakta kebenaran sejarah Indonesia. Menurutnya, telah terjadi pemutarbalikan sejarah yang dapat menimbulkan kerawanan. Dikemukakan, buku teks tersebut tidak menyebutkan pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 dan lainnya memuat keterlibatan Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965 yang menyebut PKI.

Mochtar Arifin menegaskan, apabila buku-buku teks sejarah itu dibiarkan beredar dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban umum. Karenanya keputusan Jaksa Agung juga menyebutkan kewajiban bagi pihak yang menyimpan dan memilikinya untuk menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Kepada pihak berwenang, dalam hal ini kejaksaan, kepolisian dan alat negara yang berwenang menjaga ketertiban umum diwajibkan menyita buku-buku yang masih beredar.

Terhadap adanya larangan itu, muncul komentar yang bernada menyangkan. Sejarawan Asvi Warman Adam dari LIPI, misalnya, menilai keputusan itu sebagai kemunduran bagi penulisan sejarah Indonesia. Pelarangan itu disebutnya melanggar kaidah ilmiah. Bahkan akan membingungkan para siswa seraya mempertanyakan mengapa buku-buku itu sampai dilarang.

Di antara kita tentu ada yang berpendapat, pelarangan buku teks sejarah yang tidak menyebutkan kedua peristiwa pemberontakan itu secara

Pemerintah menyatakan kurikulum ini sebagai "kurikulum eksperimen" urung diterapkan sehingga setelah Kurikulum 1994 beralih ke Kurikulum 2006. Dalam Kurikulum 1994 dicantumkan keterangan keterlibatan PKI, begitu juga pedoman untuk Kurikulum 2006. Dengan alasan ketidaksesuaian itu pula, Kejaksaan Agung melarang ke-13 judul buku dipakai.

Dari sisi demokratisasi pasca 1998, kasus pelarangan buku merupakan langkah mundur. Lebih menarik lagi, pelarangan menyangkut buku teks, pegangan praksis pendidikan tingkat menengah pertama dan menengah atas. Sasaran obyektif buku-buku itu adalah anak-anak sekolah, bukan masyarakat umum. Namun, ketika pemerintah melihat buku-buku itu juga diedarkan untuk umum lewat penjualan bebas di toko buku dan lapak-lapak pinggir jalan, pemerintah mengategorikannya dalam konteks umum.

Dari sisi itu pelarangan terlihat berlebihan. Di tengah era semua informasi bisa diakses dengan mudah, di tengah banyaknya pilihan variasi bahan, guru sejarah tidak terlalu mengambil hanya dari satu bahan, tetapi bagaimana menyampaikan episode berikut keterlibatan PKI dalam peristiwa 1948 dan 1965. Masuk akal guru sejarah yang berlatar pendidikan sejarah tidak begitu terpengaruh pelarangan. Sebaliknya, bagi sekolah dan guru yang hanya mengambil 13 judul buku sebagai satu-satunya referensi, pelarangan itu masuk akal. Ada fakta sejarah yang disembunyikan. Materi yang disampaikan dalam kelas berbeda dengan realitas yang ada dalam masyarakat umum. Masuk akal alasan Jaksa Agung, pelarangan sekaligus dimaksudkan agar anak didik tidak bingung.

Pelarangan Buku Pelajaran

Kompas, 27 Maret 2007

Bagaimana menyikapi pelarangan 13 judul buku pelajaran sejarah untuk SMP/madrasah tsanawiyah, SMA/madrasah aliyah/SMK? Ke-13 judul itu dilarang karena tidak mencantumkan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa Madiun 1948 dan peristiwa 1965. Kejaksaan Agung berkukuh pada keputusan per 5 Maret 2007. Komunitas Sejarah Indonesia dengan motornya Dr Asvi Warman Adam, sejarawan dari LIPI, menuntut dicabut. Kesalahan tidak bisa sepenuhnya ditanggungkan pada penerbit. Penerbit mempersiapkan buku pelajaran untuk Kurikulum 2004.

Pemerintah menyatakan kurikulum ini sebagai "kurikulum eksperimen" urung diterapkan sehingga setelah Kurikulum 1994 beralih ke Kurikulum 2006. Dalam Kurikulum 1994 dicantumkan keterangan keterlibatan PKI, begitu juga pedoman untuk Kurikulum 2006. Dengan alasan ketidaksesuaian itu pula, Kejaksaan Agung melarang ke-13 judul buku dipakai.

Dari sisi demokratisasi pasca 1998, kasus pelarangan buku merupakan langkah mundur. Lebih menarik lagi, pelarangan menyangkut buku teks, pegangan praksis pendidikan tingkat menengah pertama dan menengah atas. Sasaran obyektif buku-buku itu adalah anak-anak sekolah, bukan masyarakat umum. Namun, ketika pemerintah melihat buku-buku itu juga diedarkan untuk umum lewat penjualan bebas di toko buku dan lapak-lapak pinggir jalan, pemerintah mengategorikannya dalam konteks umum.

Dari sisi itu pelarangan terlihat berlebihan. Di tengah era semua informasi bisa diakses dengan mudah, di tengah banyaknya pilihan variasi bahan, guru sejarah tidak terlalu mengambil hanya dari satu bahan, tetapi bagaimana menyampaikan episode berikut keterlibatan PKI dalam peristiwa 1948 dan 1965. Masuk akal guru sejarah yang berlatar pendidikan sejarah tidak begitu terpengaruh pelarangan. Sebaliknya, bagi sekolah dan guru yang hanya mengambil 13 judul buku sebagai satu-satunya referensi, pelarangan itu masuk akal. Ada fakta sejarah yang disembunyikan. Materi yang disampaikan dalam kelas berbeda dengan

realitas yang ada dalam masyarakat umum. Masuk akal alasan Jaksa Agung, pelarangan sekaligus dimaksudkan agar anak didik tidak bingung.

Kedua fakta sejarah itu, khususnya peristiwa tahun 1965, di kalangan ilmuwan, termasuk ilmuwan sejarah, belum satu kata. Duduk soalnya masih belum ada kata putus. Adalah tugas mereka untuk terus menggali dan menyampaikan deskripsi peristiwa yang sebenar-benarnya.

Sementara itu, praksis pendidikan pun menuntut deskripsi historis. Dalam konteks ini sudah seharusnya, sesuai dengan kewenangannya pemerintah memasukkan atau tidak memasukkan fakta sejarah sebagai bagian dari proses *nation and character building*.

Pedoman yang dipegang adalah biarlah persoalan itu menjadi urusan dan pekerjaan rumah para ilmuwan sejarah; bukan mereka yang berkecimpung dalam upaya proses pendidikan anak-anak. Biarlah anak didik tidak dibuat bingung oleh wacana yang masih berkembang di kalangan ilmuwan sejarah. ***

Pembentukan Bangsa dan Balai Pustaka

Republika, 8 September 2006

Apa yang Anda teringat dari Balai Pustaka? Siti Nurbaya, Salah Asuhan, Si Johan dan Si Jamin, dan buku-buku sastra lama seperti itu? Ataukah ada yang lain yang sangat mendasar bagi pembentukan bangsa ini?

Pembentukan bangsa. *Nation building*. Itu sebuah istilah yang telah lama tidak kita per-cakapkan. Padahal, keberhasilan dalam 'pembentukan bangsa' sangat menentukan masa depan kita. Akankah kita kelak menjadi bangsa maju dan salah satu yang terdepan dalam merancang peradaban dunia? Ataukah hanya akan terus-menerus menjadi konsumen tak cerdas peradaban dunia yang didiktekan oleh pihak lain? Keberhasilan 'pembentukan bangsa' sangat bergantung pada kesungguhan kita semua untuk menekuninya.

Pembentukan bangsa memerlukan pergulatan intensif pemikiran. Pemikiran menyangkut karakter bangsa. Juga menyangkut sikap dalam kebudayaan dan peradaban. Pengalaman bangsa lain menunjukkan bahwa pergulatan tersebut acap memerlukan jalan yang berliku dan terjal. Norwegia harus menyusun istilah-istilah lokal untuk membuat bahasa sendiri. Juga merumuskan legenda Trolnya sendiri, serta menuliskan sejarah Vikingnya sendiri yang dapat menunjukkan perbedaan dengan saudara tuanya: Denmark dan Swedia.

Jalan yang harus ditempuh Amerika lebih getir lagi. Dalam perjalanan tersebut, masalah penyikapan terhadap Indian sebagai warga asli melahirkan banyak pembantaian. Penyikapan terhadap masalah perbudakan menimbulkan pecahnya perang Utara-Selatan. Penyikapan terhadap warga keturunan Afrika menghasilkan praktik diskriminasi rasial. Itu adalah sebagian dari harga yang harus dibayar dalam pembentukan bangsa Amerika Serikat.

Pergumulan Jepang dalam 'pembentukan bangsa' dapat disimak dari tahun-tahun yang mengiringi Restorasi Meiji 1868. Di tahun-tahun itulah berlangsung pergulatan intensif tentang bagaimana jalan kebudayaan Jepang harus diteguhkan. Haruskah Jepang mengadopsi sebanyak

mungkin kebudayaan Barat yang terbukti mampu mengarahkan peradaban dunia? Ataukah, justru mengambil budayanya sendiri semurni mungkin. Peran usaha penerbitan, seperti Kodansa, sangat penting di dalam pergulatan tersebut.

Kita? Banyak pemikir dan pembangun kebudayaan telah bekerja keras untuk merumuskan bagaimana sosok bangsa ini semestinya. Soetan Takdir Alisjahbana, penulis *Layar Berkembang* itu, berusaha untuk mencari format yang tepat bagaimana masyarakat yang mayoritas Muslim ini dapat menyerap nilai positif Barat. Para pemikir lain juga berusaha sama kerasnya mencari bentuk, bagaimana sosok dan karakter bangsa kita sebaiknya. Dalam pergulatan tersebut, Balai Pustaka telah memainkan peran kunci sebagai mediumnya.

Kini proses 'pembentukan bangsa' itu seperti terhenti. Bangsa ini telah terperosok ke tataran yang begitu praktis, yakni sekadar bagaimana mengelola benturan kepentingan masyarakatnya untuk berkuasa dan menjadi kaya. Kita tak lagi memiliki visi serta elan sebagai bangsa. Sementara itu, Balai Pustaka beberapa tahun terakhir juga telah merosot perannya menjadi sekadar alat untuk menampung bisnis percetakan proyek-proyek pemerintah. Itu pun dikelola secara tidak amanah.

Kita adalah bangsa besar. Kita juga mengaku sebagai bangsa beragama. Semestinya kita mempunyai sosok dan karakter yang lebih baik dibanding bangsa-bangsa lain. Karena itu, mari lanjutkan langkah membentuk bangsa dan mengokohkannya. Balai Pustaka dapat diperankan kembali seperti di masa-masa awal pergerakan kemerdekaan dulu. Balai Pustaka dapat menjadi medium kunci untuk 'pembentukan bangsa'. Secara lebih sederhana juga untuk membangun karakter masyarakat seperti mendorong gemar membaca, berdisiplin, hemat energi, menjaga kebersihan, gemar menabung, dan sebagainya.

Balai Pustaka jelas bukan sekadar penerbit sastra lama dan buku pelajaran sekolah. Balai Pustaka dapat berperan lebih penting lagi bagi bangsa ini lewat perbukuan. Itu, tentu tugas kita semua untuk mewujudkannya. ***

Kesadaran Masyarakat Kita Membaca Buku

Kedaulatan Rakyat, 5 Maret 2007

7ampaknya, kesadaran masyarakat kita pada buku sudah semakin tinggi. Artinya, dorongan untuk membaca buku terutama yang baik, sudah bisa diharapkan ke depan. Setidaknya, beberapa kali dalam setahun berlangsung pameran buku, akan membukakan cakrawala seluas-luasnya bagi masyarakat.

Seperti pameran yang diselenggarakan Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) DIY dan SHK mulai hari Sabtu 3 Maret 2007 di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, Yogyakarta, merupakan satu dari begitu banyak pameran buku di kota pendidikan ini. Dampaknya, masyarakat tentu akan menjadi lebih akrab dengan berbagai macam kemasan pemikiran dalam bentuk buku.

Salah satu keluhan masyarakat yang cukup klasik mengenai buku adalah tingginya harga buku. Tingginya harga buku bisa dipahami ketika bahan-bahan bakunya juga tidak bisa dikendalikan. Kecenderungan penerbit menerbitkan buku-buku serius yang tebal, buku-buku disertai pada doktor, buku-buku kajian yang mendalam, mengakibatkan harga jualnya menjadi mahal. Bagi masyarakat yang masih belum menganggap buku sebagai kebutuhan, harga yang tinggi justru akan menjadi kendala. Daya beli yang jauh dari jangkauan, menyebabkan buku tidak dekat dengan masyarakat.

Namun agaknya, keluhan semacam itu sudah bisa diatasi. Beberapa toko buku sudah bisa memberi diskon. Meskipun untuk beberapa judul masih tergolong mahal sesudah diberi diskon, pada hemat kita sudah ada upaya mendekatkan buku-buku dengan daya beli masyarakat. Diskon yang diberikan, juga sering terjadi pada pameran-pameran buku. Masyarakat, dengan adanya momentum seperti itu biasanya menunggu banjir buku murah.

Di sisi lain jumlah penerbit juga semakin marak, sehingga buku-buku yang terbit bisa lebih bervariasi. Masyarakat bisa menemukan berbagai alternatif bacaan yang bisa mencerdaskan bangsa. Pada gilirannya, penerbit-penerbit yang marak itu bisa dilibatkan dalam pameran-pameran

buku. Misalnya pemeran buku yang konsentrasinya pada sastra, pada politik, pada buku-buku agama, akan menggiring kesadaran masyarakat menjadi semakin tinggi: bahwa buku juga sebuah kebutuhan.

Kelak, barangkali buku akan lebih utama dibandingkan rokok. Sebab, kalau rokok yang dikonsumsi akan menimbulkan dampak bagi kesehatan, maka jika buku yang dikonsumsi akan membuat bangsa menjadi cerdas. Harapan-harapan semacam ini kiranya tidak bertentangan dengan cita-cita bangsa sejak kemerdekaan. Tidak menciptakan generasi yang sakit, melainkan menciptakan generasi yang cerdas dan maju. Dengan buku, pendidikan, dan kesadaran untuk berkembang diharapkan generasi muda kita yang cerdas dan maju bisa terwujud.***

Harga Buku yang Lebih Terjangkau

Media Indonesia, 24 September 2006

Pemerintah dan DPR tengah membuat terobosan agar khazanah perbukuan kita lebih bergairah. Upaya itu dilakukan melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbukuan. Harapannya, dengan RUU itu, harga buku akan menjadi jauh lebih murah, jauh lebih terjangkau, sehingga minat baca masyarakat dapat lebih meningkat.

Untuk menunjang misi itu, dalam RUU Perbukuan digagas kemungkinan agar pemerintah dapat membeli hak cipta (*copy right*) naskah buku dari penulis. Naskah itu kelak dimasukkan ke situs *web*. Di situs *web* itulah, semua orang dapat mengambil, mencetaknya, tanpa harus meminta izin dari penulis maupun Depdiknas. Bahkan, tanpa harus membeli bukunya di toko buku.

Tentu, terobosan yang menggembirakan, yang datang pada saat yang tepat. Yaitu, pada saat masyarakat terus mengeluh soal mahalnnya harga buku. Pada saat biaya pendidikan kian tidak terjangkau. Dan pada saat itu, pemerintah datang dengan solusi, mencoba meringankan beban rakyat. Yang kita harapkan ialah niat baik itu berjalan efektif di lapangan. Kita tidak ingin upaya luhur itu justru menambah anomali dalam sistem perbukuan nasional. Sehingga persoalan perbukuan yang sudah sangat kompleks menjadi bertambah rumit.

Harus dipikirkan benar agar pembelian hak cipta naskah buku tidak merusak sistem yang telah saling menopang. Dari penulis, penerbit, percetakan, hingga distribusi. Juga harus diupayakan agar tidak sekadar indah saat masih dalam gagasan, tetapi tidak membawa kemaslahatan setelah diterapkan.

Naskah yang dibeli hak ciptanya, katakanlah, sudah dimuat dalam situs *web*. Masyarakat boleh mengambilnya. Lantas, berapa banyak rakyat yang bisa memanfaatkannya terkait dengan jumlah melek internet? Akankah biaya mencetak naskah itu lebih murah daripada harga buku? Bagaimana dengan harga kertas yang mahal? Bagaimana bila ada yang mencetak naskah itu menjadi buku dan menjualnya ke pasar?

Harus dipikirkan pula jenis buku apa saja yang akan dibeli hak ciptanya. Misalnya, buku yang belum pernah terbit, buku yang pernah terbit tetapi tidak ada di pasar, atau buku yang sudah terbit dan masih ada di pasar. Karena keputusan itu akan berdampak kepada banyak kepentingan terkait.

Banyak masalah yang belum terjawab, tetapi upaya untuk membuat harga buku lebih murah harus didukung. Sebab, buku adalah sumber ilmu. Bila harga buku terjangkau, kita berharap minat baca dapat dipacu lebih meningkat.

Bila minat baca meningkat, akan meningkat pula kualitas sumber daya manusia kita. Karena itu, kelak pemerintah harus meningkatkan efektivitas dan efisiensi proyek ini dari hulu sampai hilir sehingga cita-cita luhur itu benar-benar menjadi kenyataan di tingkat rakyat.

Jangan sampai niat luhur itu sekadar menjadi wacana. Jangan pula iktikad baik itu berkembang menjadi kerumitan baru. Karena, alih-alih membuat harga buku menjadi murah, kita khawatir, pola itu hanya akan melahirkan sistem perbukuan yang murahan.***

PBA Harus Dorong Budaya Baca

Suara Pembaruan, 28 Mei 2007

Meskipun hampir 10 tahun terakhir perkembangan teknologi informasi bisa dirasakan di Indonesia, ternyata masih banyak anggota masyarakat kita yang belum melek huruf. Dari data yang dikeluarkan pemerintah menyebutkan bahwa 13 juta penduduk Indonesia masih buta aksara. Dari jumlah tersebut, bagian terbesar atau sekitar 11 juta adalah anak-anak berusia 7 hingga 12 tahun. Sementara sisanya, sekitar 1,2 juta atau 11 persen yang buta aksara adalah perempuan dewasa, dan lima persen atau 650.000 lainnya adalah pria dewasa.

Anak-anak yang belum melek huruf itu, menurut laporan yang masuk ke pemerintah, kebanyakan tinggal di daerah pedalaman. Di sana, mereka kesulitan menjangkau sekolah. Belum lagi banyak gedung sekolah di pedalaman yang kondisinya jauh dari layak untuk tempat belajar mengajar.

Angka-angka buta aksara itu diungkapkan Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Bambang Sudibyo, Jumat (25/5) di Yogyakarta. Menariknya, pengungkapan itu dilakukan sehari menjelang puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), yang dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Sabtu 26 Mei 2007, di Taman Siwa, Prambanan, Jawa Tengah.

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini sekitar 218 juta jiwa, angka buta aksara sebanyak 13 juta tentu dianggap sebagai bagian kecil. Bagi pemerintah tidak akan sulit mengentaskan mereka melalui program Pemberantasan Buta Aksara (PBA). Bahkan Mendiknas berani menargetkan pada tahun 2008 sudah tidak ada lagi penduduk Indonesia yang buta aksara. Kendati pemerintah menganggap 13 juta penduduk yang masih buta aksara bukan angka yang signifikan, namun kita harus tetap prihatin dan waspada. Sebab, bukan tidak mungkin angka itu akan membengkak lagi, walaupun ada tekad pemerintah bahwa tahun depan semua sudah melek huruf.

Sebenarnya bukan pekerjaan mudah untuk membuat mereka melek huruf.

Apalagi kebanyakan dari mereka yang masih buta aksara itu tinggal di pedalaman. Kita bisa membayangkan betapa buruknya fasilitas pendidikan yang ada di sana. Bagaimana tidak, sekolah di daerah yang letaknya tak jauh dari Jakarta saja masih ada yang kondisinya sangat memprihatinkan. Apalagi yang begitu jauh dari ibu kota negara.

Belum lagi pengadaan buku dan tenaga pengajar. Terkait dengan pengadaan buku, baru sebagian kecil masyarakat yang bisa mendapatkannya dengan mudah. Buku masih merupakan barang mewah bagi sebagian besar masyarakat Indonesia lantaran harganya yang tidak murah. Harga buku yang masih tinggi ini penting menjadi catatan bagi pemerintah, sebab tujuan dari pemberantasan buta aksara adalah agar masyarakat semakin mencintai dunia baca.

Untuk membuat masyarakat melek huruf, berarti dibutuhkan tenaga pengajar atau guru. Nyatanya, penghargaan terhadap profesi ini pun kian merosot. Pemerintah seharusnya memberi perhatian terhadap masalah tenaga pengajar ini. Bagaimana mungkin masyarakat buta aksara yang kebanyakan berada di daerah pedalaman mendapatkan tenaga pengajar, sedangkan guru-guru yang berstatus honorer di daerah tak jauh dari kota saja masih dibayangi masa depan yang suram.

Kita berharap, niat pemerintah untuk membuat semua masyarakat melek huruf melalui program PBA tidak sekadar membuat setiap orang tahu lambang-lambang dan bunyi huruf. Program ini pun jangan cuma untuk menurunkan angka buta huruf semata. Sebab, kendati sudah banyak yang melek huruf, tapi masyarakat kita masih berjarak dengan dunia baca lantaran harganya, buku masih merupakan barang mewah.***

Minat Baca yang Mengkhawatirkan

Media Indonesia, 28 Agustus 2006

Kalau ada pertanyaan, persoalan sangat penting apa yang menentukan kecemerlangan suatu bangsa, tapi tidak mendapatkan perhatian yang memadai di negeri ini, jawabnya adalah minat baca. Salah satu buktinya, bisa dilihat dari rendahnya masyarakat kita mengunjungi perpustakaan.

Di Jakarta, misalnya, rata-rata jumlah pengunjung perpustakaan daerah per hari hanya 200 orang. Padahal, jumlah penduduk Jakarta sekitar 10 juta orang. Data Perpustakaan Nasional menunjukkan hal serupa. Dari segelintir pengunjung perpustakaan, tidak sampai 20% yang meminjam buku.

Kalau diasumsikan kebiasaan membaca itu ada pada mereka yang meminjam buku, berarti tingkat kebiasaan membaca kita baru 20%. Padahal, di negara maju, angka kebiasaan membaca buku mencapai 80%.

Tanda rendahnya minat baca makin kentara bila kita menengok jumlah surat kabar yang dikonsumsi masyarakat kita. Idealnya, satu surat kabar dikonsumsi sepuluh orang. Namun, di Indonesia satu surat kabar dibaca 45 orang. Rasio itu masih di bawah Filipina yang perbandingannya 1:30 dan Sri Lanka yang 1:38.

Dalam soal penyediaan buku dan pengembangan minat baca, kita pun jauh tertinggal bila dibandingkan dengan sejumlah negara. Berdasarkan data dari International Publisher Association, Kanada, produksi buku paling tinggi ditunjukkan Inggris, yaitu rata-rata 100 ribu judul buku per tahun. Jerman mampu menerbitkan sekitar 80 ribu judul, Jepang 65 ribu judul buku. Sedangkan Indonesia hanya lima ribuan judul buku.

Deretan minimnya perhatian kita terhadap penciptaan budaya membaca semakin panjang ketika kita melihat data perpustakaan. Jumlah perpustakaan yang kondisinya memadai sangat jauh dari harapan. Menurut data Deputi Pengembangan Perpustakaan Nasional, dari sekitar 300 ribu jumlah SD hingga SLTA, baru 5% yang memiliki perpustakaan.

Data statistik itu menunjukkan membaca tidak menjadi arus utama. Juga, itu memperlihatkan fakta betapa buruknya kita menciptakan budaya membaca. Yang berkembang adalah budaya menonton, dengan cara melompat. Yaitu, kita melompat dari keadaan praliterer ke masa pascaliterer, tanpa melalui masa literer. Kita melompat senang menonton televisi, tanpa melalui tahap masyarakat gemar membaca.

Kondisi itu diperburuk semakin tidak pedulinya orang tua akan kegiatan membaca. Semakin banyak keluarga yang kedua orang tuanya sibuk bekerja sehingga mereka tidak lagi mempunyai cukup waktu dan energi untuk mendekatkan anaknya dengan buku.

Ironisnya, ketika anak mulai masuk sekolah, materi baku kurikulum sering membuat guru tidak mempunyai ruang gerak untuk berkreasi. Akhirnya, mereka hanya terpaku pada satu buku wajib.

Jelas, itu malapetaka bagi bangsa jika tidak segera diatasi bersama. Dan, mengatasinya pun tidak dengan tambal sulam. Keluarga harus menjadikan membaca sebagai kegemaran sejak dini. Sekolah harus menerapkan sistem pendidikan yang menimbulkan kegairahan membaca. Dan pemerintah harus menyediakan dana cukup bagi perpustakaan serta mendorong tumbuhnya budaya membaca.***



Pusat Informasi dan Humas, Departemen Pendidikan Nasional
Gedung C, Lt. 4, Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Telepon/Fax : (021) 5701088
Website : <http://www.setjen.diknas.go.id>; E-mail : pih@diknas.go.id

ISBN : 978-979-15617-3-0 (jilid lengkap)
ISBN : 979-978-15617-6-1 (jilid 3)

...penerimaan, penerimaan
...sistem penerimaan siswa baru, ke
...tindakan, sertifikasi guru, prestasi siswa, ke
...penerimaan siswa baru, tenaga kependidikan, anggaran
...baru, kekerasan dalam pendidikan, penerimaan siswa ba
...wa, kekerasan dikampus, sistim penerimaan
...AH, siswa baru, ujian nasional, tenaga kependidikan,
...penerimaan siswa baru, kekerasan dalam pendidikan, penerim
...stasi siswa, kekerasan dikampus, sistim penerimaan sis
...pendidikan, anggaran pendidikan, SERTIFIKASI GURU, I
...pendidikan, SERTIFIKASI GURU, prestasi siswa, kekerasan dikampus, s
...ru, ujian nasional, tenaga kependidikan, ANGGARAN PENDIDIKAN, s
...lam pendidikan, ujian nasional, tenaga kependidikan, anggaran pend
...penerimaan siswa baru, PRESTASI SISWA, kekerasan dalam pendidikan
...tifikasi guru, kekerasan dikampus, sistim penerimaan siswa baru, ke

Perpustakaan
Jenderal
370